

ABSTRAK

Negara berbasis hukum memiliki komponen utama yang harus dipenuhi yaitu kesetaraan hak tiap warga dalam mengakses layanan publik. Hak tersebut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi harus dilakukan dari skala terkecil dimulai dari desa sebagai unit pemerintahan terdekat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat khususnya terkait dana desa tanpa terkecuali di Desa Wanutengah yang merupakan satu dari 16 desa/kelurahan di Kecamatan Parakan, Temanggung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan keterbukaan informasi publik atas dana desa di Desa Wanutengah dan menganalisis korelasi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan *good village governance* di Desa Wanutengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-doktrinal, atau disebut dengan metode penelitian sosio-legal atau empiris. Data yang digunakan merupakan data primer yang merupakan hasil dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data penelitian yang digunakan berupa analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dana desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Wanutengah dengan membentuk payung hukum berupa Peraturan Kepala Desa Wanutengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Wanutengah. Implementasi keterbukaan informasi dana desa faktanya sudah dilakukan sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku seperti penyebarluasan informasi realiasi anggaran pendapatan dan pengeluaran desa melalui papan informasi dan pamflet yang dipasang pada kanal informasi tiap dusun. Informasi terkait dana desa bahkan disebarluaskan melalui website resmi dan instagram Pemerintah Desa Wanutengah sebagai upaya mendukung ekosistem *e-government*. Parameter tata kelola pemerintahan desa yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan keterlibatan masyarakat terbukti memiliki korelasi dengan implementasi keterbukaan informasi dana desa. Solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dana desa adalah pemerintah desa harus meningkatkan literasi digital masyarakat karena media informasi digital merupakan perangkat yang paling inklusif untuk menyebarkan informasi khususnya berkaitan dengan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Keterbukaan Informasi Publik, Desa Wanutengah.